

---

**PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH FINLANDIA  
TERKAIT OXFORD CORONAVIRUS GOVERNMENT RESPONSE  
TRACKER (OxCGRT) TERHADAP PENANGANAN COVID-19**

**Trinita Estetika Sigalingging<sup>1\*</sup>, Rozmita Dewi Yuniarti Rozali<sup>1</sup>**

<sup>1,2</sup>Akuntansi, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia

\*trinitatika@gmail.com

Diterima:03/06/2020

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the effect of policies issued by the Finnish government to deal with the Covid-19 pandemic. Through analysis, the enforcement of policies related to OxCGRT can have an impact regarding the handling of Covid-19. These impacts include the suppression of the growth rate of Covid-19 cases, an increase in the recovery of Covid-19 cases, as well as other impacts related to Finnish governance. The method used in this study is library research. Based on research that has been done, can be concluded that the Finnish government has implemented good governance in terms of handling this Covid-19 case with the implementation of all existing policies such as the closure of educational facilities and workplaces, cancellation of events and public meetings, closure of all non essential businesses, travel restrictions, policies to conduct testing, and stay at home policies. The implication of this study is as consideration for every element in a country to handle the Covid-19 case. The limitation of this study is the lack of literature on this topic so researchers are quite difficult to obtain data.*

**Keywords: Policy, Governance, Covid-19.**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Finlandia untuk menangani pandemi Covid-19. Melalui analisis, pemberlakuan kebijakan terkait OxCGRT dapat memberikan dampak terkait penanganan Covid-19. Dampak tersebut antara lain penekanan laju pertumbuhan kasus Covid-19, peningkatan kasus sembuh Covid-19, serta dampak lain yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan Finlandia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Finlandia telah melaksanakan tata kelola yang baik dalam hal penanganan kasus Covid-19 ini dengan pemberlakuan segala kebijakan yang ada seperti penutupan fasilitas pendidikan dan tempat kerja, pembatalan acara dan pertemuan publik, penutupan semua bisnis non esensial, pembatasan perjalanan, kebijakan untuk melakukan pengujian, dan kebijakan *stay at home*. Implikasi penelitian ini yaitu sebagai bahan pertimbangan bagi setiap elemen yang ada dalam suatu negara

untuk menangani kasus Covid-19. Keterbatasan dari penelitian ini adalah masih sedikitnya literatur yang membahas topik ini sehingga peneliti cukup sulit untuk mendapatkan data.

**Kata Kunci: Kebijakan, Tata Kelola, Covid-19.**

## **PENDAHULUAN**

Wabah *Corona virus disease 2019* (Covid-19) pertama kali terjadi pada bulan Desember tahun 2019 di kota Wuhan provinsi Hubei, Cina. Kasus Covid-19 ini sendiri terus menyebar di seluruh dunia, sehingga sampai saat ini (30 September 2020) setidaknya sudah lebih dari dua ratus negara dinyatakan telah terpapar wabah virus ini dengan jumlah kasus positif sebanyak lebih dari tiga puluh tiga juta penduduk dan jumlah kematian lebih dari satu juta penduduk di dunia. *World Health Organization* (WHO) telah mengumumkan Covid-19 sebagai pandemi global pada 11 Maret 2020 sehingga pemerintah di seluruh dunia diperhadapkan pada keputusan yang sulit mengenai pembentukan kebijakan untuk penanganan kasus Covid-19 di negaranya masing-masing, sehingga dalam situasi ini pemerintah memerankan bagian penting untuk dapat beradaptasi dengan cepat serta mengambil keputusan yang terbaik sehingga dapat tercipta kebijakan yang tepat untuk mencegah pertumbuhan kasus ini serta untuk menangani berbagai masalah yang muncul akibat adanya kasus ini sendiri karena selain untuk masalah kesehatan, kebijakan yang nantinya dikeluarkan juga akan memberikan pengaruh terhadap aspek lainnya seperti pada aspek ekonomi dan sosial sehingga pemerintah harus mampu menanggapi setiap masalah serta menempatkan berbagai kebijakan yang ada secara proporsional.

Seperti yang telah dikatakan sebelumnya bahwa wabah Covid-19 ini sendiri tidak hanya mengakibatkan timbulnya keadaan darurat kesehatan masyarakat tetapi juga telah menjadi penyebab timbulnya krisis ekonomi di dunia. Saat ini tindakan untuk pencegahan serta penanggulangan sangat diperlukan untuk mengurangi penyebaran dari virus ini agar dapat menyelamatkan nyawa banyak orang di seluruh dunia. Namun untuk hal itu tentu dibutuhkan biaya yang besar, karena pengurangan kegiatan bekerja sekaligus dapat menyebabkan pengurangan aktivitas ekonomi itu sendiri. Seperti yang dikatakan oleh McKibbin & Sidorenko (2006) dalam Chasemi, dkk (2020) secara umum, pandemi akan mengakibatkan negara-negara yang terlibat menghadapi kesulitan ekonomi termasuk penurunan tenaga kerja serta perubahan atas risiko investasi. Biaya-biaya untuk hal ini dirasa cukup berat untuk negara-negara di dunia khususnya negara berkembang yang umumnya memiliki kapasitas perawatan untuk kesehatan yang lebih rendah, pasar keuangan yang lebih sempit, ruang fiskal yang lebih sedikit, dan tata kelola yang

cenderung buruk. Suatu kebijakan akan memberikan dampak tertentu seperti spesifikasi uraian program terkait bagaimana dan dimana kebijakan tersebut harus dilakukan serta bagaimana kebijakan tersebut ditafsirkan (Yunus, dkk, 2020). Sehingga para pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan secara saksama dan hati-hati dengan melihat keseluruhan keadaan negaranya dan negara-negara lain sehingga dapat menghasilkan keputusan serta kebijakan yang efektif bagi setiap elemen di dalamnya sehingga segala konsekuensi yang tidak diinginkan dapat dihindarkan.

Melihat hal tersebut University of Oxford menciptakan sebuah alat yang dikenal dengan nama *Oxford Coronavirus Government Response Tracker* (OxCGRT) untuk melacak dan membandingkan tanggapan kebijakan di seluruh dunia secara ketat dan konsisten. Secara sistematis OxCGRT mengumpulkan informasi tentang beberapa tanggapan kebijakan umum yang berbeda yang telah diambil pemerintah untuk menanggapi pandemi pada tujuh belas indikator seperti penutupan sekolah dan pembatasan perjalanan. OxCGRT pada saat ini memiliki data dari lebih 180 negara, dan data tersebut juga digunakan untuk menginformasikan "*lockdown rollback checklist*" yang dapat melihat seberapa ketat negara-negara tersebut memenuhi empat dari enam rekomendasi WHO untuk melonggarkan *lockdown*. OxCGRT ini sendiri bertujuan untuk melihat kebijakan mana yang mungkin efektif dalam mengendalikan wabah Covid-19 terutama ketika negara-negara mulai memberlakukan pelanggaran pembatasan (Blavatnik School of Government University of Oxford, 2020). Maka dari itu pada kesempatan kali ini peneliti akan meneliti bagaimana tata kelola serta kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Finlandia terkait OxCGRT dalam hal penanganan wabah Covid-19 ini, apakah hal tersebut dinilai efisien atau malah menimbulkan konsekuensi yang tidak diharapkan.

Finlandia merupakan salah satu negara maju di dunia yang mempunyai infrastruktur yang maksimal, mempunyai sistem pendidikan yang sangat baik, serta pelayanan kesehatan dan kebudayaan yang dinamis. Meskipun demikian, hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa negara ini tidak terpapar oleh wabah Covid-19. Melalui laman Kedutaan Besar Republik Indonesia di Helsinki, Republik Finlandia pada tanggal 29 Januari 2020 pihak *Finnish Institute for Health and Welfare* (THL) telah mengkonfirmasi adanya kasus pertama terkait virus Corona di Finlandia. Maka dari itu KBRI Helsinki, Finlandia terus memantau langkah yang diambil oleh pemerintah Finlandia dan otoritas kesehatannya terkait penanganan virus corona, sehingga sehari setelah dikonfirmasinya kasus pertama di negara ini pemerintah menyampaikan beberapa himbauan kepada warga Finlandia sebagai bentuk kewaspadaan dari kemunculan kasus Covid-19 di negara ini seperti mengikuti arahan otoritas setempat terkait pencegahan tertularnya virus corona, selalu

menjaga kesehatan dalam aktivitas sehari-hari, serta menghubungi pihak terkait apabila terjadi hal darurat. Setidaknya sampai pada penulisan artikel ini (30 September 2020), di Finlandia sendiri sudah ada sekitar 9.892 penduduk yang terpapar virus ini dengan jumlah kematian sebanyak 343 penduduk (Our World in Data Coronavirus, 2020).

Pemerintah Finlandia telah menerapkan sejumlah kebijakan sebagai reaksi terhadap pandemi Covid-19 ini dalam kurun waktu yang terbilang cukup singkat, dan beberapa kebijakan yang telah diberlakukan oleh pemerintah Finlandia terkait OxCGRRT sebagai upaya untuk pencegahan serta pengurangan penyebaran dari wabah Covid-19 ini adalah pemberlakuan *lockdown* di sejumlah daerah di negara ini, *social distancing* untuk setiap masyarakat yang berada di negara ini, *work and study from home* termasuk penutupan kantor dan sekolah untuk setiap pekerja dan pelajar di negara ini, penerbitan himbauan bagi WNI di Finlandia, penundaan perjalanan baik melalui jalur darat, air, maupun udara yang hendak ke Finlandia, serta mendorong *influencer* di Finlandia untuk mengkampanyekan hal terkait Covid-19. Sehingga pada tahun ini walaupun dunia sedang dilanda wabah Covid-19, Finlandia tetap berada dalam peringkat pertama dalam kategori negara paling bahagia di dunia (*World Happiness Report*, 2020). Maka dari itu pada kesempatan kali ini peneliti akan memaparkan kebijakan-kebijakan beserta kebijakan terkait OxCGRRT yang telah diberlakukan di Finlandia untuk menghadapi kasus Covid-19.

### **1. Kebijakan Pemberlakuan Lingkungan yang Sehat**

Pandemi Covid-19 saat ini menyoroti akan perlunya suatu pendekatan yang komprehensif dan terpadu terkait kesehatan manusia di dunia ini. meningkatkan kesehatan lingkungan melalui pengupayaan akan kualitas udara yang baik, air dan sanitasi, pengelolaan limbah, dan selalu berupaya untuk melindungi keanekaragaman hayati, akan mampu mengurangi kerentanan masyarakat di dunia terhadap pandemi virus ini dan dengan hal itu akan sekaligus mampu meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan masyarakat secara keseluruhan. Paparan polusi udara yang buruk di lingkungan sekitar area dalam ruangan mampu meningkatkan risiko penyakit kardiovaskuler, pernapasan, dan perkembangan, serta kematian dini, dan dapat membuat individu lebih rentan terhadap Covid-19 ini. Akses air dan kualitas serta perlindungan keanekaragaman hayati, pengelolaan limbah merupakan kunci untuk memerangi penyebaran pandemi ini. (OECD, 2020).

Finlandia merupakan negara yang memiliki kualitas udara yang baik sehingga sangat minim populasi dari negara ini akan terpapar polusi udara karena Finlandia menggunakan sumber energi yang ramah lingkungan, sehingga untuk kualitas udaranya sendiri negara ini berada di posisi ke-

6, air dan sanitasi berada di posisi ke-1, sumber daya air di posisi ke-20, sehingga menjadikan negara ini berada di posisi ke-1 untuk dampak kesehatan. Finlandia juga menjadi negara paling bersih di dunia versi *Environmental Performance Index* (EPI) tahun 2020. Hal ini terjadi karena pemerintah Finlandia memiliki kebijakan bagi para rakyatnya untuk lebih banyak menggunakan transportasi umum yang disediakan di negara ini. Pemerintah Finlandia pun menyediakan dana yang sangat besar guna penyediaan sarana transportasi umum yang baik serta nyaman untuk digunakan. Selain itu pemerintah Finlandia juga telah mengeluarkan berbagai peraturan guna menjaga lingkungan di negara ini, beberapa peraturan tersebut adalah pasal 20 konstitusi Finlandia yang berisi komitmen pemerintah dalam pelestarian lingkungan dan kewajiban perusahaan untuk melakukan perlindungan lingkungan (Sri Wartini, 2015)

*“the public authorities shall endeavour to guarantee for everyone the right to a healthy environment and for everyone the possibility to influence the decisions that concern their own living environment. Responsibility for the environment nature and its biodiversity, the environment and the national heritage are the responsibility of everyone”*

Selain itu juga terdapat undang-undang lingkungan yang secara khusus bertujuan untuk mengatur perlindungan lingkungannya, yaitu pasal 5 *environmental Protection Act* menyatakan:

- (1) Operators must have sufficient knowledge of their activities' environmental impact and risks and of ways to reduce harmful effects (knowledge requirement).*
- (2) If the activities cause or may directly result in environmental pollution, the operator must take the appropriate action without delay in order to prevent pollution, or, if pollution has already resulted, to reduce it to a minimum (obligation to prevent pollution)*

Selain beberapa peraturan yang telah disebutkan di atas, tentunya masih banyak lagi peraturan serta kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Finlandia guna meminimalkan tindakan pencemaran lingkungan, dan tentunya hal tersebut sangat baik untuk dilakukan pada situasi pandemi Covid-19 saat ini, karena seperti yang telah dikatakan sebelumnya bahwa udara yang bersih serta lingkungan yang sehat mampu mengurangi kerentanan masyarakat terhadap pandemi virus ini dan dengan hal itu sekaligus mampu meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan masyarakat secara keseluruhan.

## **2. Lockdown, Quarantine, Social Distancing & Travel Severely Limited**

Pemerintah Finlandia telah mengadopsi kebijakan terkait pembatasan selama pandemi Covid-19 untuk memperlambat dan mencegah penyebaran virus ini di Finlandia, untuk melindungi kapasitas sumber daya dan ketahanan sistem perawatan kesehatan, dan untuk melindungi

masyarakatnya terutama mereka yang paling berisiko pada 16 Maret 2020 (Annika Rosin, 2020). *Lockdown* merupakan salah satu kebijakan yang telah diberlakukan di berbagai negara di seluruh dunia termasuk negara Finlandia sebagai upaya untuk pencegahan penularan virus corona lebih lanjut. Cindy Cheng, dkk (2020) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa setidaknya telah ada 143 negara yang telah memberlakukan kebijakan *lockdown*. *Lockdown* ini sendiri adalah suatu kegiatan untuk menutup sejumlah wilayah dalam suatu negara dengan cara menghalangi atau mencegah seseorang maupun sekelompok orang dari luar yang hendak memasuki wilayah tersebut. Hal ini dilakukan agar apabila terdapat seseorang yang ternyata telah terpapar virus ini, orang tersebut tidak dapat menularkannya kepada masyarakat yang sehat di wilayah yang memberlakukan kebijakan *lockdown*. *Lockdown* atau karantina ini pun diberlakukan sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari suatu penyakit khususnya covid-19 sekarang ini yang dapat berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat, meningkatkan ketahanan suatu negara di bidang kesehatan masyarakat, serta memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat dan orang-orang yang berjuang melawan virus ini di garda depan yaitu para petugas kesehatan.

Kebijakan *lockdown* ini sendiri telah diberlakukan di Finlandia pada tanggal 25 Maret 2020 dan telah sepenuhnya dilakukan sejak 28 Maret 2020 dengan memutuskan untuk mengadakan pembatasan terkait aktivitas di wilayah Uusimaa. Segala perjalanan yang berasal maupun menuju wilayah ini dilarang dengan adanya pengecualian khusus yaitu kegiatan terkait pengiriman barang maupun perjalanan komuter yang berkaitan dengan pekerjaan dengan segala ketentuan yang berlaku seperti dengan memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh perusahaan masing-masing yang menyatakan bahwa pekerjaan itu penting (Annika Rosin, 2020). Dikarenakan mayoritas pasien Covid-19 berada di wilayah Helsinki termasuk Uusimaa, menjadi alasan kebijakan ini diberlakukan di wilayah tersebut. Selain itu pemerintah Finlandia juga menutup perbatasan dengan negara lain, serta melarang keras adanya pertemuan publik dengan jumlah lebih dari sepuluh orang.

Dalam pelaksanaan *lockdown* ini tentunya pemerintah negara Finlandia tetap bertanggung jawab terhadap kondisi masyarakatnya, terutama untuk kondisi masyarakat menengah ke bawah yang tidak mempunyai pilihan selain tetap bekerja. Salah satu kalangan yang pemerintah bantu dalam hal ini adalah para sopir taksi dengan mengambil tindakan untuk memberikan sosialisasi serta berbagai Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker serta sarung tangan sekali pakai kepada pengendara dan penumpangnya. Selain itu pemerintah juga memberikan plastik transparan kepada

taksi yang beroperasi sebagai penghalang antara pengemudi dan penumpang. Selain itu pemerintah Finlandia juga mengambil tindakan yang sangat baik dengan memberikan tempat tinggal kepada para tunawisma dengan tetap memastikan bahwa mereka tidak terpapar virus ini sehingga tidak ada korban ketidakadilan akibat dari pandemi ini (Dan Ciuriak, 2020). Hal yang dilakukan oleh pemerintah Finlandia ini merupakan tindakan yang sangat baik bagi masyarakatnya karena dalam mengatasi pandemi virus ini pemerintah tetap memperhatikan kesejahteraan rakyatnya dari berbagai golongan. Hal ini dipertegas dengan pendapat Elisabeth Dewi (2020) yang mengatakan bahwa kepemimpinan mereka memberikan sejumlah pelajaran penting bagi penanganan pandemi ini, yaitu dengan adanya kebenaran, ketegasan, penguasaan teknologi yang baik, dan cinta/kepedulian. Hal inilah yang akan mendatangkan keberhasilan bagi sejumlah negara yang menerapkan prinsip ini untuk menekan laju penyebaran Covid-19 dengan cara berempati dan menunjukkan kepedulian kepada seluruh lapisan masyarakat serta tidak sibuk menyalahkan pihak lain maupun situasi yang sedang terjadi.

Pemerintah Finlandia juga memberlakukan kebijakan *Social Distancing* kepada seluruh rakyatnya yang tidak mempunyai pilihan selain tetap melakukan pekerjaannya di luar rumah. Tentunya hal ini tetap dalam pengawasan karena pemerintah tidak semata-mata membiarkan rakyatnya keluar rumah untuk hal yang tidak penting. Berbagai negara di dunia pun telah menerapkan kebijakan *social distancing* ini guna mengurangi interaksi antar orang-orang dalam komunitas yang lebih luas karena terdapat kemungkinan individu yang tertular tetapi belum diidentifikasi sehingga belum terisolasi (Smith & Freedman, 2020). Pemberlakuan kebijakan ini tentunya sangat baik guna pemutusan mata rantai penyebaran Covid-19 ini, karena akibat dari keterbatasan kita yang tidak dapat mengetahui apakah orang-orang di sekitar kita yang masih melakukan aktivitasnya di luar rumah telah tertular virus ini atau belum. Maka dari itu kita hendaknya membatasi jarak dengan yang lain agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

Pemerintah Finlandia pun dengan tegas mengeluarkan perintah bagi rakyatnya untuk melakukan isolasi/karantina di rumah maupun di rumah sakit, khususnya bagi orang yang merasa sakit ataupun mengalami gejala Covid-19 ini. karantina (*quarantine*) menurut Smith & Freedman (2020) adalah segala pembatasan gerakan, sering dengan pengawasan demam, kontak ketika tidak jelas apakah mereka telah terinfeksi tetapi belum menunjukkan gejala atau bahkan belum terinfeksi. Kebijakan ini juga merupakan langkah yang baik untuk dilaksanakan guna memutus mata rantai penyebaran virus ini karena belajar dari pengalaman ketika terjadi epidemi Sars pada

tahun 2003, karantina telah sukses dilaksanakan sebagai langkah yang efektif dalam hal penghilangan virus ini.

Selain itu pemerintah Finlandia dengan cepat mengeluarkan kebijakan terkait pembatasan perjalanan di Finlandia sendiri, antara lain:

1. Penetapan status darurat untuk Covid-19 berupa larangan kumpul massa, penutupan sekolah, dan kantor.
2. Penangguhan layanan jalur kereta api dari atau ke Rusia.
3. Pembatalan sejumlah besar penerbangan domestik dan internasional maskapai Finnair.
4. Penutupan perbatasan (berlaku tanggal 19 Maret 2020). (Safe Travel Finlandia, 2020).

Selain melakukan segala kebijakan yang telah disebutkan di atas, pemerintah Finlandia tentunya selalu melakukan berbagai konferensi guna memberikan sosialisasi kepada seluruh rakyatnya untuk selalu menjaga kesehatan dengan selalu mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat dan bergizi, selalu berolahraga, serta mencuci tangan sebelum maupun sesudah beraktivitas.

### ***3. Work and Study From Home***

Penetapan status darurat untuk Covid-19 berupa larangan kumpul massa, penutupan sekolah, dan kantor juga dengan cepat diberlakukan oleh pemerintah Finlandia (Safe Travel Finlandia, 2020). Dalam hal ini pemerintah Finlandia sangat peduli dengan keadaan rakyatnya sehingga menghimbau para pekerja dan peserta didik di Finlandia untuk melakukan kegiatan bekerja serta belajar dari rumah guna menghalangi penyebaran virus ini. Hal ini pun dianggap menjadi salah satu cara yang terbaik agar para pekerja dapat tetap menjalankan kegiatan operasional perusahaannya sebagaimana mestinya, dan tentunya dengan memberlakukan segala penyesuaian yang baik agar pekerjaannya tetap berjalan efektif. Selain itu hal ini juga dianggap baik bagi seluruh peserta didik di negara ini karena mereka dapat tetap memperoleh ilmu walaupun tidak bertatap muka secara langsung dengan pengajar. Ryan P. Shepherd (2018) mengatakan bahwa pembelajaran daring seperti ini menjadi sebuah alternatif kurikulum tatap muka. Menurut Adib Rifqi Setiawan (2020) terdapat beberapa kelebihan dari pemberlakuan pembelajaran secara daring, antara lain adalah dapat memperluas akses pendidikan untuk setiap aspek yang ada karena penjadwalannya yang lebih fleksibel, dapat mengurangi kendala kapasitas kelembagaan yang timbul akibat kebutuhan akan bangunan infrastruktur kelembagaan.

Pembelajaran secara daring ini pun dianggap menjadi sebuah tuntutan terlebih dalam kondisi dunia saat ini. Hal ini diperkuat oleh hasil pantauan UNESCO yang menyebutkan bahwa sudah



lebih dari 188 negara di dunia ini telah menerapkan penutupan sekolah yang berdampak pada 1.576.021.818 siswa atau sebanyak 91,3% dari populasi siswa di dunia, dan karena hal ini pada 4 Maret 2020 UNESCO menyarankan untuk menggunakan media pembelajaran jarak jauh dan membuka *platform* pendidikan yang dapat digunakan sekolah dan tenaga pendidik untuk menjangkau peserta didiknya agar proses pembelajaran dapat terus berjalan (UNESCO, 2020). Selain dikarenakan adanya wabah covid-19 di dunia saat ini, melaksanakan pembelajaran secara daring juga dianggap sangat baik guna mengantarkan pendidikan ke arah yang lebih maju lagi. Panigrahi, Srivastava, dan Sharma (2018) mengatakan bahwa pembelajaran tatap muka dianggap tertutup dan telah dipahami sebagai suatu model tradisional, sehingga dibutuhkan fasilitas pembelajaran yang lebih baik dengan pemanfaatan teknologi informasi. Dengan adanya pembelajaran daring saat ini tentu akan menciptakan sebuah pendidikan tinggi suatu lingkungan belajar modern, Huda dkk (2018).

Tentunya untuk menciptakan pendidikan yang lebih maju dibutuhkan hubungan timbal balik yang baik dari semua aspek yang terkait, baik dari segi fasilitas, tenaga pengajar, dan peserta didik. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mojtaba Aghajani & Mahsa Adloo (2018), peserta didik memiliki sikap positif terhadap pembelajaran daring dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka langsung. Hal ini pun semakin dipertegas dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Sally Baldwin, dkk (2017) yang menunjukkan bahwa evaluasi pembelajaran daring menghasilkan efektivitas yang signifikan. Hal yang sama pun disebutkan oleh Wahyudin Darmalaksana (2020) yaitu bahwa pembelajaran daring sebagai akibat dari pandemi Covid-19 ini terbukti efektif dalam pencapaian tujuan pembelajaran sebagai perwujudan tantangan pemimpin digital pendidikan tinggi pada abad ke-21. Seperti yang telah dikatakan di atas bahwa penerapan pembelajaran secara daring ini membutuhkan hubungan timbal balik dari semua aspek yang ada, dan salah satunya adalah dari segi pengadaan fasilitas yang baik, dan pemerintah Finlandia saat ini terus berusaha untuk mengupayakan hal yang terbaik sehingga di Finlandia telah terdapat berbagai *platform* yang dapat digunakan untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran daring ini sendiri.

#### **4. Kebijakan Wajib Melakukan Pengujian Covid-19**

Melihat kondisi dunia saat ini dengan adanya pandemi Covid-19 menjadikan banyak orang merasa khawatir untuk melakukan aktivitasnya di luar rumah karena adanya keterbatasan dari manusia itu sendiri yang tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui apakah orang yang berada di sekitarnya terbebas dari virus ini atau tidak. Untuk itu sangat diperlukan kebijakan dari pemerintah suatu negara untuk menindaklanjuti hal ini, dan Finlandia dalam hal ini sangat

mengerti akan kekhawatiran rakyatnya sehingga pemerintah Finlandia terus mengembangkan fasilitas medis dan tenaga medis itu sendiri guna membantu melakukan pengujian terhadap kasus Covid-19 ini dan hal ini merupakan hal yang wajib untuk dilakukan. Menurut Ajeet N. Mathur (2020), komitmen bersama tentang penggunaan sumber daya kesehatan global dapat menjadi sumber kekuatan pemersatu yang kuat di dunia. Pada bulan Februari 2020, The Finnish Institute for Health and Welfare (THL) memprakarsai latihan praktis untuk menganalisis persepsi risiko dan kepercayaan terhadap otoritas publik dalam konteks penyakit coronavirus (Anna Leena Lohiniva, dkk, 2020).

Melalui laman *Good News From Finland 2020* dikatakan bahwa *VTT Technical Research Centre Finland* telah memulai untuk melakukan pengembangan uji cepat untuk Covid-19 bersama dengan MeVac, pusat penelitian vaksin gabungan dari Rumah Sakit Distrik Helsinki dan Uusimaa (HUS) dan Universitas Helsinki. Metode pengujian ini didasarkan pada pendeteksian antigen virus dari Covid-19. Setelah tes selesai dilakukan, hasilnya akan diberikan kepada para profesional kesehatan dengan metode yang akurat, cepat, dan efisien untuk mendeteksi infeksi sejak dini dari Covid-19 ini. Dengan metode pengujian yang dikembangkan ini, kita akan mengetahui hasilnya dalam waktu 15 menit atau bahkan kurang dari itu yang secara signifikan lebih cepat dari tes yang ada saat ini. Segala kebijakan serta fasilitas yang ada dianggap sangat baik karena apabila hal ini tetap konsisten dilakukan pastinya akan mampu menekan laju pertumbuhan Covid-19 ini.

## **5. Pemberlakuan Empat Elemen Praktik Terbaik**

Pemerintah Finlandia juga memberlakukan empat elemen praktik terbaik sebagai upaya untuk menanggulangi kasus Covid-19 ini sendiri (Martin Scheinin, 2020), empat elemen terbaik tersebut antara lain:

- a. Prinsip kenormalan: Pihak parlemen tidak ditangguhkan tetapi sangat banyak terlibat dalam manajemen darurat sehari-hari, bahkan jika tidak dalam bentuk prosedur legislatif penuh. Kemampuannya untuk beroperasi dapat dijamin melalui langkah-langkah internal yang diadopsi oleh Parlemen itu sendiri, misalnya dapat dilihat dari pemindahan banyak bisnis resminya secara daring, dan masih banyak lagi. selain itu segala langkah serta kebijakan mengenai *lockdown, quarantine & social distancing* dalam kehidupan sehari-hari merupakan hal yang terutama dan dilaksanakan melalui rekomendasi/kebijakan pemerintah.

- b. Klausul hak asasi manusia: klausa darurat dalam konstitusi dan undang-undang kekuasaan darurat mengandung klausul eksplisit yang mensyaratkan kepatuhan dengan kewajiban hak asasi manusia internasional.
- c. Klausula *sunset* (matahari terbenam): Semua dekrit darurat diwajibkan bersifat sementara (maksimum 6 bulan dan dalam praktiknya selama epidemi Covid-19 jauh lebih pendek) dan akan hilang secara otomatis jika tidak diperbarui oleh kabinet dan akan ditinjau kembali oleh parlemen. Selain itu satu-satunya undang-undang sejauh ini diadopsi langsung di bawah klausa darurat (pasal 23) konstitusi berisi klausula *sunset*.
- d. Tinjauan sistematis dan pluralistik atas konstitusionalisme dan kesesuaian hak mendasar: kanselir kehakiman memantau serta menyaring terkait legalitas setiap kebijakan sebelum diputuskan oleh kabinet. Sebagai bagian dari tinjauan parlemen, komite hukum konstitusi yang sedang berdiri akan memeriksa konstitusionalisme dan kesesuaian hak mendasar dari setiap keputusan darurat. Dalam melaksanakan hal ini, apabila komite berhadapan dengan pembuatan keputusan darurat, komite ini sendiri juga harus mendengar para pakar akademis dari pihak luar yang biasanya merupakan profesor dari badan hukum konstitusional dan lima dari tujuh pendapatnya didapat dari rakyat, serta segala kebijakan tersebut tunduk pada pengawasan publik.

Setiap langkah dan juga aktivitas yang dilakukan oleh setiap elemen dari negara ini terus dipantau dan disosialisasikan kepada seluruh rakyatnya melalui konferensi agar tidak ada hal yang ditutup-tutupi dalam penanganan pandemi ini dan agar setiap elemen dari negara ini tetap sadar dan mau untuk terus berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam penanganan kasus Covid-19, karena itu perlu digarisbawahi bahwa adanya peran dari setiap elemen di suatu negara sangat penting untuk menghentikan penyebaran virus ini dan menghindari peningkatan pembatasan penegakan hukum terhadap hak-hak warga negara selama mungkin (Katarina Giritli, 2020).

Maka dari itu berdasarkan keseluruhan pendahuluan yang berisi kebijakan mengenai kasus Covid-19 yang telah dipaparkan dalam artikel ini, peneliti akan menganalisis bagaimana keterkaitan serta pengaruh dari adanya pemberlakuan kebijakan terkait OxCGRY yang ditetapkan pemerintah Finlandia terhadap penanganan setiap masalah yang timbul akibat adanya kasus Covid-19 di Finlandia.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam artikel ini peneliti akan menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengolah suatu penelitian berdasarkan catatan dari berbagai data pustaka yang berkaitan dengan topik penelitian. Penelitian dengan menggunakan *library research* ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai data pustaka yang berkaitan dengan tema dalam artikel ini kemudian membaca, mencatat, serta mengolah data penelitian tersebut. Dalam artikel ini, jenis metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif, yaitu metode dengan cara pengumpulan data, menyusun atau mengklarifikasi, menyusun dan menginterpretasikannya (Surakhmad, 1980). Selain itu, dalam artikel ini peneliti juga menggunakan model pendekatan kajian isi (*content analysis*) yaitu suatu model berupa pembahasan yang mendalam terhadap isi suatu informasi yang tertulis atau tercetak di media massa.

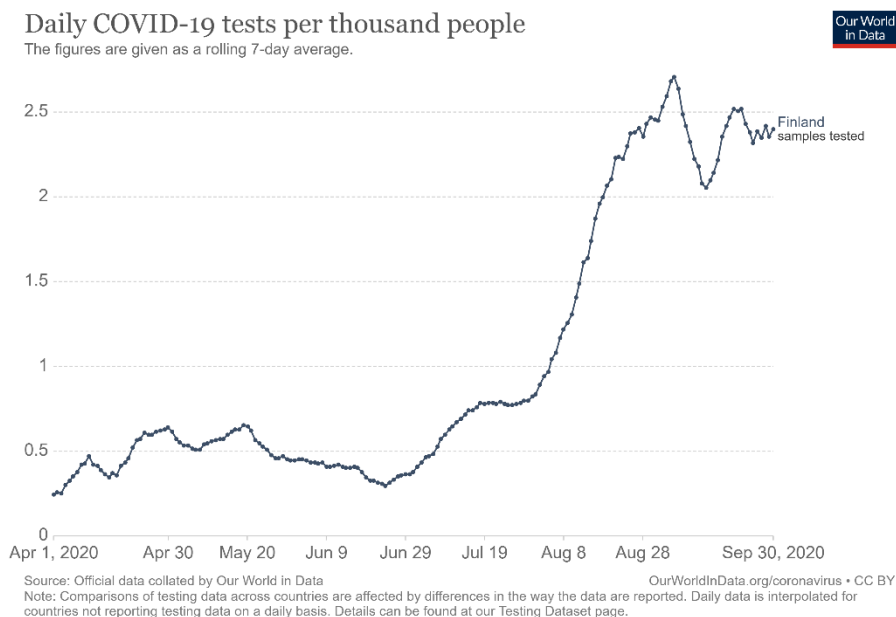
Penelitian yang dilakukan dalam artikel ini adalah dengan mengkaji ulang terkait beberapa penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, sehingga data yang ada dalam artikel ini tidak secara langsung didapatkan dari subjek penelitiannya atau yang biasa disebut dengan data sekunder, dan penelitian terdahulu inilah yang kemudian akan menjadi data dalam artikel ini guna melakukan penelitian. Data sekunder yang peneliti gunakan dalam artikel ini merupakan jurnal bereputasi yang telah membahas beberapa topik penelitian mengenai “Kebijakan Pemerintah Finlandia Terhadap Penanganan Covid-19”, sehingga topik yang telah dibahas tersebut dapat membantu peneliti untuk melengkapi isi artikel ini melalui data primer yang terdapat pada jurnal-jurnal yang sebelumnya telah dilakukan.

Pencarian data terdahulu untuk artikel ini diawali dengan masuk melalui laman *Google Scholar* dengan memasukkan kata kunci “*Good Governance for Covid-19 in Finland*” sehingga muncul lebih dari 12.000 artikel terkait. Kemudian atas beberapa artikel tersebut, peneliti memilahnya ke dalam jurnal yang benar-benar relevan dengan tema dalam artikel ini. selain mengambil data dari jurnal bereputasi, peneliti juga mengambil literatur dari berbagai informasi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang melalui masing-masing laman yang dimiliki.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, adanya pemberlakuan kebijakan terkait OxCGRt seperti penutupan fasilitas pendidikan, penutupan tempat kerja, pembatalan acara dan pertemuan publik, penutupan semua bisnis non esensial, pembatasan perjalanan baik dari maupun

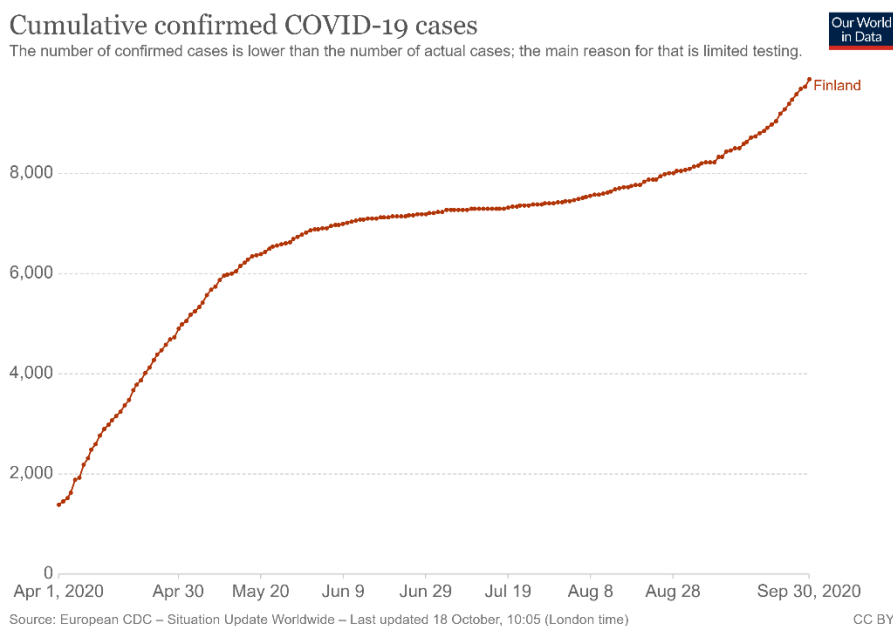
ke luar negeri, wajib untuk melakukan pengujian terkait kasus Covid-19, wajib menggunakan masker, menjaga kebersihan dan kesehatan, serta pembatasan jarak memberikan pengaruh dalam hal untuk menangani kasus Covid-19 di Finlandia. Dapat dikatakan demikian karena kebijakan yang telah dilakukan ini dinilai mampu menekan kasus pertumbuhan serta penanganan kasus Covid-19 itu sendiri yang dapat dilihat dari data statistik dan penelitian terhadap pandemi Covid-19 di Finlandia yang berasal dari situs [ourworldindata.org](https://ourworldindata.org) dan [worldometers.info](https://worldometers.info).



**Gambar 1. Total tes Covid-19 per 1000 orang.**

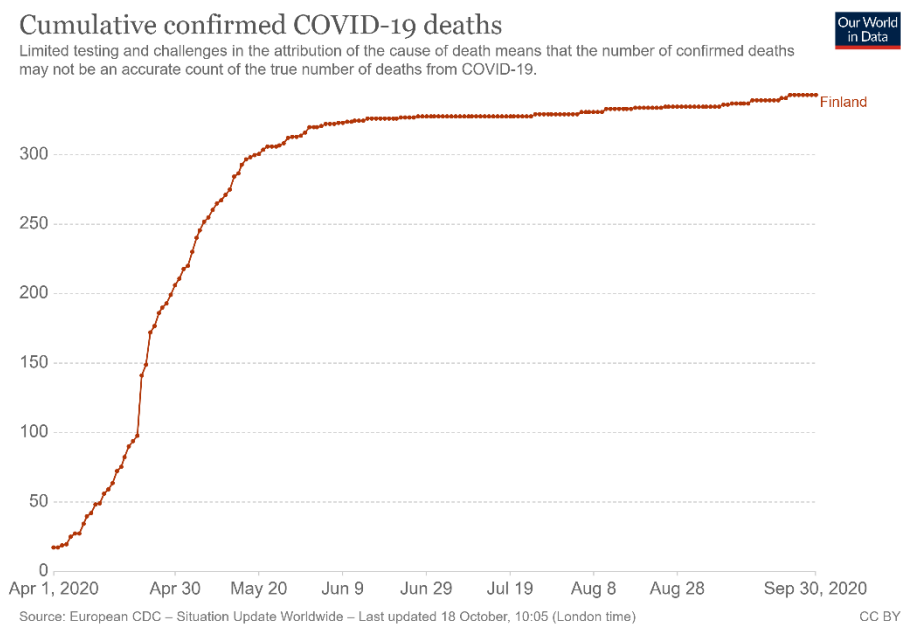
*Sumber: OurWorldInData.org/coronavirus, 2020*

Berdasarkan gambar 1 yang menunjukkan grafik total tes Covid-19 per 1000 orang, dapat dilihat bahwa kecenderungan data naik secara fluktuatif, sehingga pada 30 September 2020 di Finlandia terdapat 2.40 persen sampel yang dites.



**Gambar 2. Total kasus Covid-19 yang terkonfirmasi.**

*Sumber: OurWorldInData.org/coronavirus, 2020*



**Gambar 3. Total kematian dikarenakan Covid-19 yang terkonfirmasi.**

*Sumber: OurWorldInData.org/coronavirus, 2020*

Berdasarkan gambar 2 dan 3 yang menunjukkan grafik total kasus Covid-19 yang terkonfirmasi serta total kematian dikarenakan Covid-19, dapat dilihat bahwa kecenderungan data

konstan naik, sehingga sampai 30 September 2020 di Finlandia terdapat sebanyak 9.892 orang yang terkonfirmasi terpapar Covid-19 dan dari jumlah kasus ini sebanyak 343 orang dinyatakan meninggal dunia diakibatkan terpapar Covid-19.

Menurut data yang telah diteliti, akibat dari pemberlakuan kebijakan pemerintah serta peran aktif dari seluruh masyarakat, sampai pada saat penulisan artikel ini dari total 1.038.721 orang yang melakukan tes Covid-19 hanya terdapat 9.892 orang atau sebesar 0.95% yang terkonfirmasi terpapar virus ini. Selain itu, akibat dari pelayanan kesehatan yang sangat baik yang dilakukan oleh tenaga medis serta fasilitas kesehatan yang memadai, dari 9.892 orang yang terpapar virus ini 8.100 orang atau sebesar 81.88% telah dinyatakan sembuh, dan sebanyak 343 orang atau sebesar 3.47% dinyatakan meninggal, sehingga sampai 30 September 2020 terdapat 1.449 orang yang masih terpapar Covid-19. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah yang diterapkan di Finlandia berpengaruh secara langsung atas penanganan pandemi Covid-19. Penemuan ini diperkuat dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Martin Scheinin (2020) yang mengatakan bahwa sebagian besar reaksi yang ditunjukkan oleh negara Finlandia terhadap pandemi Covid-19 ini didasarkan pada langkah-langkah hukum, yaitu atas rekomendasi yang dikeluarkan pemerintah kepada rakyat yang mengikat secara hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

## **PENUTUP**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pemerintah Finlandia telah melaksanakan tata kelola yang baik dalam hal penanganan kasus Covid-19 ini dengan pemberlakuan segala kebijakan yang ada terkait dengan OxCGRt seperti penutupan fasilitas pendidikan dan tempat kerja, pembatalan acara dan pertemuan publik, penutupan semua bisnis non esensial, pembatasan perjalanan, kebijakan untuk melakukan pengujian, serta kebijakan *stay at home*. Dapat dikatakan demikian karena pemerintah Finlandia beserta seluruh rakyatnya selalu berusaha untuk tetap konsisten menjalankan segala peraturan dan kebijakan yang ada. Pemerintah Finlandia juga selalu transparan dalam memberikan informasi terkait kasus Covid-19 ini berdasarkan kebijakan yang ada, dan kebijakan serta peraturan ini secara mandiri telah ditetapkan oleh pemerintah Finlandia dengan penuh pertimbangan berdasarkan segala informasi serta hasil pengawasan kasus Covid-19 ini yang tentunya segala peraturan serta kebijakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaan serta manfaatnya untuk menekan laju pertumbuhan Covid-19 ini, sehingga di negara Finlandia hanya sebanyak 0.95% dari jumlah tes yang dinyatakan positif

terpapar virus ini, dan jumlah kasus sembuh pun konstan mengalami peningkatan. Namun untuk hal ini tetap diperlukan pengembangan atas kebijakan yang ada dari pemerintah dengan selalu melihat perkembangan dari kasus Covid-19 ini agar kebijakan ini sendiri dapat semakin menekan laju pertumbuhan Covid-19 di Finlandia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aghajani, M., & Adloo, M. (2018). The effect of online cooperative learning on students' writing skills and attitudes through telegram application. *International Journal of Instruction*, 11(3), 433–448. <https://doi.org/10.12973/iji.2018.11330a>
- Baldwin, S., Ching, Y. H., & Hsu, Y. C. (2018). Online Course Design in Higher Education: A Review of National and Statewide Evaluation Instruments. *TechTrends*, 62(1), 46–57. <https://doi.org/10.1007/s11528-017-0215-z>
- Blavatnik School of Government University of Oxford. (2020) Coronavirus Government Response Tracker. Dari <https://www.bsg.ox.ac.uk/research/research-projects/coronavirus-government-response-tracker>. Diakses pada 19 Oktober 2020.
- Chen, Cindy, Barceló, J., Hartnett, A. S., & Kubinec, R. (2020). *CoronaNet: A Dyadic Dataset of Government Responses to the COVID-19 Pandemic*. 1–75. <https://osf.io/dkvxy/download>
- Ciuriak, D. (2020). The Policy Response to the Coronavirus Pandemic: Recommendations for Canada. *SSRN Electronic Journal*, March, 1–9. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3559946>
- Darmalaksana, W., & Dkk. (2020). *Analisis Pembelajaran Online Masa WFH Pandemic Covid-19 sebagai Tantangan Pemimpin Digital Abad 21*. 1(1), 1–12. <http://digilib.uinsgd.ac.id/30434/1/11042020%2015.30%20KTI.pdf>
- Dewi, E. (2014). *Gender, Kepemimpinan dan Kemanusiaan: Sebuah Refleksi Situasi Pandemi Covi-19*. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*. <http://journal.unpar.ac.id/index.php/JurnalIlmiahHubunganInternasional/article/download/3863/2908>
- Environmental Performance Index. 2020. Finland. Dari <https://epi.envirocenter.yale.edu/epi-country-report/FIN>. Diakses pada 30 April 2020.
- Ghasemi, dkk. (2020). *How do governments perform in facing*, *Munich Personal RePEc Archive*. <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/99844/>
- Giritli Nygren, K., & Olofsson, A. (2020). Managing the Covid-19 pandemic through individual responsibility: the consequences of a world risk society and enhanced ethopolitics. *Journal of Risk Research*, 0(0), 1–5. <https://doi.org/10.1080/13669877.2020.1756382>
- Good News From Finland. 2020. A Rapid Test for The New Coronavirus Under Development in Finland. Dari <https://www.goodnewsfinland.com/finnish>



- Guv, B. (1988). Health policy in finland. *International Journal of Technology Assessment in Health Care*, 4(3), 375–384. <https://doi.org/10.1017/S0266462300000337>
- Hayry, M. (2020). The COVID-19 Pandemic: A Month of Bioethics in Finland. *Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics: CQ: The International Journal of Healthcare Ethics Committees*, 1–12. <https://doi.org/10.1017/S0963180120000432>
- Helliwell, J. F., Huang, H., & Wang, S. (2019). Statistical Appendix 1 for Chapter 2 of World Happiness Report 2019. *World Happiness Report 2019*, 104(104), 1–72. <https://worldhappiness.report/ed/2019/>
- Hietanen, M., Sibakov, V., Hallfors, S., & Von Nandelstadh, P. (2000). Safe use of mobile phones in hospitals. *Health Physics*, 79(5 SUPPL.), 77–84. <https://doi.org/10.1097/00004032-200011001-00010>
- Huda, M., Maseleno, A., Teh, K. S. M., Don, A. G., Basiron, B., Jasmi, K. A., Mustari, M. I., Nasir, B. M., & Ahmad, R. (2018). Understanding Modern Learning Environment (MLE) in big data era. *International Journal of Emerging Technologies in Learning*, 13(5), 71–85. <https://doi.org/10.3991/ijet.v13i05.8042>
- Kedutaan Besar Republik Indonesia di Helsinki, Republik Finlandia. 2020. Finlandia. Dari <https://kemlu.go.id/helsinki/id/pages/finlandia/2664/etc-menu>. Diakses pada 29 April 2020.
- Kedutaan Besar Republik Indonesia di Helsinki, Republik Finlandia. 2020. Himbauan Kepada Diaspora Indonesia di Finlandia dan Estonia Terkait Virus Corona (2019-nCoV) No.040/PK/I/2020.<https://backpanel.kemlu.go.id/PublishingImages/Helsinki%20Informasi%202020/HimbauanTtgCorona.jpg>. Diakses pada 29 April 2020.
- Kedutaan Besar Republik Indonesia di Helsinki Republik Finlandia. 2020. Perkembangan Kondisi di Finlandia Terkait Coronavirus Disease (Covid-19). Dari <https://kemlu.go.id/helsinki/id/news/5519/perkembangan-kondisi-di-finlandia-terkait-coronavirus-disease-covid-19-12-maret-2020>. Diakses pada 29 April 2020.
- Livingston, E., & Bucher, K. (2020). Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in Italy. *Jama*, 323(14), 2020. <https://doi.org/10.1001/jama.2020.4344>
- Lohiniva, A. L., Sane, J., Sibenberg, K., Puumalainen, T., & Salminen, M. (2020). Understanding coronavirus disease (COVID-19) risk perceptions among the public to enhance risk communication efforts: A practical approach for outbreaks, Finland, February 2020. *Eurosurveillance*, 25(13), 3–6. <https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.13.2000317>
- Mathur, A. N. (2020). *Strategies for solving wicked problems of true uncertainty: Tackling pandemics like Covid-19. Indian Institute of Management.* <https://wpad.iima.ac.in/assets/snippets/workingpaperpdf/12502768892020-04-03.pdf>
- McKibbin, W. J., & Fernando, R. (2020). The Global Macroeconomic Impacts of COVID-19: Seven Scenarios. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3547729>

- Miller, Aaron, dkk. (2019). *Correlation Between Universal BCG Vaccination Policy and Reduced Morbidity and Mortality for COVID-19: An Epidemiological Study*. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- OECD. 2020. Environmental health and strengthening resilience to pandemics. Dari [https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=129\\_129937-jm4ul2jun9&title=Environmental-health-and-strengthening-resilience-to-pandemics](https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=129_129937-jm4ul2jun9&title=Environmental-health-and-strengthening-resilience-to-pandemics). Diakses pada 30 April 2020.
- Our World In Data. 2020. Statistics and Research Coronavirus Pandemic (Covid-19). Dari <https://ourworldindata.org/coronavirus>. Diakses pada 19 Oktober 2020
- Panigrahi, R., Srivastava, P. R., & Sharma, D. (2018). Online learning: Adoption, continuance, and learning outcome—A review of literature. *International Journal of Information Management*, 43(May), 1–14. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2018.05.005>
- Rosin, A. (2020). *COVID-19 and Labour Law: Finland*. 13(1), 1–8. *Italian Labour Law E-Journal*. 13(1s). <https://illej.unibo.it/article/view/10950>
- Scheinin, M. (2020). The COVID-19 Emergency in Finland: Best Practice and Problems | Verfassungsblog. *Verfassungsblog*, 1–7. <https://verfassungsblog.de/the-covid-19-emergency-in-finland-best-practice-and-problems/>
- Setiawan, A. R., & Ilmiyah, S. (2020). Students' Worksheet for Distance Learning Based on Scientific Literacy in the Topic Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). *EdArXiv*, 2019(234), 1–9. [https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.35542/osf.io/h4632](https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.35542/osf.io/h4632)
- Shepherd, R. P. (2018). Digital Writing, Multimodality, and Learning Transfer: Crafting Connections between Composition and Online Composing. *Computers and Composition*, 48, 103–114. <https://doi.org/10.1016/j.compcom.2018.03.001>
- Smith, W. (2020). *Isolation, quarantine, social distancing and community containment: pivotal role for old-style public health measures in the novel coronavirus (2019-nCoV) outbreak*. *Journal of Travel Medicine*. 27(2). <https://doi.org/10.1093/jtm/taaa020>.
- Wartini, S., & Ghafur, J. (2015). Perbandingan Kebijakan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Transnasional Corporations Atas Pelanggaran Hak Menikmati Lingkungan Yang Sehat Di Beberapa Negara. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 22(3), 346–372. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss3.art2>
- Worldometer. 2020. Coronavirus in Finlandia. Dari <https://www.worldometers.info/coronavirus/country/finland/>. Diakses pada 19 Oktober 2020.
- Yunus, N. R., & Rezki, A. (2020). Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(3), 227–238. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15083>.